

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini yang dapat dirangkum sebagai berikut:

##### 1. **Ida Ayu dan Ketut Alit (2016)**

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang akhirnya diperoleh sebanyak 159 sampel. Variabel yang digunakan adalah proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan penghindaran pajak sebagai variabel dependennya. Teknik analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

## 2. Deddy, Rita, dan Kharis (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 23 perusahaan yang terdaftar di Stock Exchange selama periode 2011-2013. Variabel yang digunakan adalah komite audit, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas sebagai variabel independen, sedangkan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit, proporsi dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 3. Sabar Warsini (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas peran praktik *corporate governance* dalam tindakan penghindaran pajak. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek pada lima negara di Asia yakni: Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand selama periode 2010-2012. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kualitas audit dan CG negara sebagai variabel independen, sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan berupa persamaan regresi linier berganda dengan model *fix effect*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada level perusahaan, auditor eksternal mampu menjalankan fungsinya sebagai mekanisme monitoring eksternal

terhadap tindakan manajemen dalam penghindaran pajak. Sedangkan pada level negara terbukti bahwa semakin baik praktik *corporate governance* suatu negara mampu membatasi manajemen perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Namun keberadaan investor institusional justru mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### 4. Hasan, Kim, Teng, and Wu (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah investor asing dapat membantu menjelaskan variasi dalam penghindaran pajak perusahaan dan apakah mekanisme seperti moralitas pajak, horizon investasi, dan tata kelola perusahaan mendasari hubungan antara investor asing dan penghindaran pajak. Sampel diambil dari 47.749 perusahaan di 32 Negara dalam periode tahun 2000-2008. Variabel yang digunakan adalah investor asing sebagai variabel independen dan penghindaran pajak perusahaan sebagai variabel dependen, sedangkan moralitas pajak, horizon investasi, dan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderator. Teknik analisis data menggunakan serangkaian *robustness tests*. Hasil penelitian menyatakan bahwa investor asing berhubungan negatif dengan penghindaran pajak perusahaan. Hubungan negatif ini didominasi oleh investor asing dari negara-negara dengan moralitas pajak yang tinggi, investor asing dengan horizon investasi jangka panjang, dan investor asing dari negara-negara dengan kualitas tata kelola perusahaan yang tinggi.

## 5. Putu dan IGK Agung (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang berjumlah 44 perusahaan. Variabel yang digunakan yaitu komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional sebagai variabel independen, sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## 6. Dyah dan Supriyadi (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Sampel yang diambil sebanyak 24 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2013. Variabel yang digunakan yaitu CSR, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen sebagai variabel independen, sedangkan praktik penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Teknik analisis data menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel CSR dan

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### **7. Teguh, Yessi dan Rusli (2015)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Return On Assets (ROA), leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2010-2013 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Variabel yang digunakan adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen, return on assets, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi sebagai variabel independen. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen ROA, leverage, dan ukuran perusahaan secara signifikan mempengaruhi penggelapan pajak parsial.

#### **8. Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif. Sampel penelitian sejumlah 80 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan corporate social responsibility sebagai variabel independen, sedangkan tindakan pajak agresif sebagai variabel dependen. Teknik analisis data menggunakan regresi linear

berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan, sedangkan ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

#### **9. Roman Lanis dan Grant Richardson (2012)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan agresivitas pajak perusahaan. Sampel diambil dari 408 perusahaan publik Australia dalam periode tahun keuangan 2008/2009. Variabel yang digunakan adalah CSR sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Teknik analisis data menggunakan *Tobit regression analysis*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komitmen investasi sosial dan strategi CSR perusahaan (termasuk etika dan perilaku bisnis) dari suatu perusahaan adalah elemen penting dari kegiatan CSR yang berdampak negatif pada agresivitas pajak.

#### **10. Huseynov dan Klamm (2012)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan auditor penyedia layanan pajak. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang membayar biaya pajak kepada auditornya untuk periode 2000-2008. Sampel tersebut meliputi S&P 500, yaitu adalah sebuah indeks yang terdiri dari saham 500 perusahaan dengan modal besar. Variabel yang digunakan adalah penghindaran pajak dan manajemen pajak sebagai variabel dependen dan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel independen. Teknik

analisis data menggunakan *multivariate regression analysis*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa CSR mempengaruhi penghindaran pajak ketika perusahaan dibagi menjadi portofolio berdasarkan tingkat CSR.



**Tabel 2.1**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU**

No.	Peneliti (Tahun)	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	<b>Ida Ayu dan Ketut Alit (2016)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen yang digunakan komite audit dan ukuran perusahaan</li> <li>- Variabel dependen yang digunakan penghindaran pajak</li> <li>- Metode pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan kriteria kriteria tertentu.</li> <li>- Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan selain komite audit dan ukuran perusahaan adalah proporsi komisaris independen dan preferensi risiko eksekutif. Sedangkan pada penelitian ini variabel independen yang digunakan selain komite audit dan ukuran perusahaan adalah kepemilikan institusional dan <i>corporate social responsibility</i> (CSR).</li> <li>- Periode penelitian sebelumnya adalah tahun 2010-2014, sedangkan pada penelitian ini periode penelitian dari tahun 2013-2015.</li> </ul>
2.	<b>Deddy, Rita dan Kharis (2016)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen yang digunakan penghindaran pajak.</li> <li>- Variabel independen yang digunakan komite audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.</li> <li>- Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen penelitian sebelumnya selain kepemilikan institusional, omite audit dan ukuran perusahaan adalah dewan komisaris, leverage, dan profitabilitas. Sedangkan pada penelitian ini variabel independen selain kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan adalah CSR.</li> <li>- Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di stock exchange pada periode 2011-2013, sedangkan pada penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015.</li> </ul>
3.	<b>Sabar Warsini (2016)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen menggunakan kepemilikan institusional</li> <li>- Variabel dependen yang digunakan penghindaran pajak</li> <li>- Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan selain kepemilikan institusional adalah kualitas audit dan CG negara. Sedangkan pada penelitian ini variabel independen yang digunakan selain kepemilikan institusional adalah komite audit, ukuran perusahaan dan CSR.</li> <li>- Penelitian terdahulu mengambil sampel perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek pada lima negara di Asia pada periode 2010-2012, sedangkan penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015.</li> </ul>

No.	Peneliti (Tahun)	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
4.	<b>Hasan, Kim, Teng dan Wu (2016)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen yang digunakan kepemilikan institusional</li> <li>- Variabel dependen yang digunakan penghindaran pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel yang diambil dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan-perusahaan di 32 negara pada periode tahun 2000-2008 sedangkan penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2013-2015.</li> <li>- Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah serangkaian <i>robustness test</i>, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda.</li> </ul>
5.	<b>Putu dan IGK Agung (2016)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen yang digunakan penghindaran pajak.</li> <li>- Variabel independen yang digunakan komite audit dan kepemilikan institusional.</li> <li>- Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen penelitian sebelumnya selain kepemilikan institusional dan komite audit adalah proporsi komisaris independen. Sedangkan pada penelitian ini variabel independen selain kepemilikan institusional dan komite audit adalah ukuran perusahaan dan CSR.</li> <li>- Periode penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu tahun 2012-2014, sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2013-2015.</li> </ul>
6.	<b>Dyah dan Supriyadi (2015)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen menggunakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR).</li> <li>- Variabel dependen yang digunakan penghindaran pajak</li> <li>- Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan selain CSR adalah profitabilitas, <i>leverage</i>, dan komisaris independen. Sedangkan pada penelitian ini variabel independen yang digunakan selain CSR adalah kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan</li> <li>- Penelitian terdahulu mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2013, sedangkan penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015.</li> </ul>

No.	Peneliti (Tahun)	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
7.	<b>Teguh, Yessi dan Rusli (2015)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen yang digunakan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan</li> <li>- Variabel dependen yang digunakan penghindaran pajak</li> <li>- Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan selain kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan adalah ROA, leverage, dan kompensasi rugi fiskal.</li> <li>- Periode penelitian pada penelitian terdahulu adalah tahun 2010-2013, sedangkan penelitian periode penelitian ini yaitu 2013-2015</li> </ul>
8.	<b>Winarsih, Prasetyono dan Kusufi (2014)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen yang digunakan penghindaran pajak.</li> <li>- Variabel independen yang digunakan corporate social responsibility (CSR)</li> <li>- Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen penelitian sebelumnya selain CSR adalah <i>good corporate governance</i>. Sedangkan pada penelitian ini variabel independen selain CSR adalah kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan.</li> <li>- Periode penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu tahun 2009-2012, sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2013-2015.</li> </ul>
9.	<b>Roman Lanis dan Grand Richardson (2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen menggunakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR).</li> <li>- Variabel dependen yang digunakan penghindaran pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah Tobit regression analysis, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.</li> <li>- Penelitian terdahulu mengambil sampel perusahaan publik Australia dalam periode tahun keuangan 2008/2009, sedangkan penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015.</li> </ul>
10.	<b>Huseynov dan Klamm (2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak</li> <li>- Variabel independen yang digunakan CSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan yang membayar biaya pajak meliputi perusahaan S&amp;P 500 sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan kriteria tertentu.</li> </ul>

## **2.2 Landasan Teori**

Landasan Teori merupakan teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini. landasan teori yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Teori Keagenan**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi terjadi saat seseorang mempekerjakan orang lain untuk memberika suatu jasa dan kemudian memberikan wewenang pengambilan keputusan. Teori keagenan berasumsi bahwa setiap orang memiliki egoisme yaitu lebih memprioritaskan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer akan fokus pada kepentingan pribadinya juga. Adanya benturan kepentingan inilah yang akan menimbulkan teori keagenan.

Bagi perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal, seringkali terjadi pemisahan antara manajemen dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemberi modal ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas hasil investasinya, sedangkan manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan diasumsikan ingin mendapatkan kompensasi keuangan yang tinggi dari perusahaan. Keinginan memaksimalkan kesejahteraan masing-masing inilah yang terkadang menyebabkan manajemen mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham sehingga terjadinya masalah keagenan.

Masalah keagenan antara pemegang saham dengan manajemen sangat berpotensi terjadi apabila manajemen bukan pemilik saham mayoritas perusahaan.

Sebagian pemegang saham menginginkan manajemen bekerja dengan tujuan memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya, pihak manajemen perusahaan bisa saja bertindak tidak mengoptimalkan keuntungan pemegang saham, tetapi malah memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Akibat masalah keagenan tersebut terjadilah *conflict of interest*. Agar pemegang saham yakin bahwa manajemen bekerja untuk kepentingan mereka, pemegang saham harus mengeluarkan *agency cost* yaitu biaya-biaya seperti pengeluaran untuk memonitor kegiatan manajemen, pengeluaran untuk membayar suatu divisi dalam organisasi yang mungkin dapat meminimalisir tindakan-tindakan manajemen yang tidak diinginkan (Teguh, 2015).

Kaitan teori dengan penelitian ini adalah karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham atau pemegang saham dengan manajemen maka perlu adanya pengawasan yang baik dari pihak profesional seperti pemilik institusional dan juga komite audit. Jika pengawasan berjalan dengan baik dan sesuai harapan maka tidak akan ada pihak yang bisa bertindak curang demi kebaikannya sendiri seperti contohnya tindakan penghindaran pajak.

### **2.2.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi merupakan sebuah teori yang membahas interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan didasarkan pada hasil akhir atau output yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat

ekonomi, sosial atau politik kepada masyarakat sesuai dengan kekuatan yang dimiliki perusahaan (Imam, 2007:412).

Pada umumnya perusahaan membutuhkan legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, karena setiap perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk beroperasi berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Perusahaan harus sadar bahwa pandangan masyarakat terhadap citra perusahaan akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial akan dianggap sebagai cara bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kaitan teori dengan penelitian ini, dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus sadar bahwa hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan sangat mempengaruhi citra perusahaan. sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan dituntut untuk mampu melakukan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai dan batasan-batasan norma yang berlaku di masyarakat. Apabila perusahaan ingin menjaga citra perusahaan maka perusahaan perlu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, investor, kreditor, konsumen, dan juga pemerintah. Dalam upaya menjaga kepercayaan dari masyarakat termasuk diantaranya adalah pemerintah tersebut, maka kecil kemungkinan perusahaan melakukan tindak penghindaran pajak.

### **2.2.3 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi (Fadhilah, 2014). Kepemilikan institusional mempunyai peran yang penting dalam memantau kinerja manajemen agar lebih optimal karena dianggap mampu mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

Pada dasarnya institusi memberikan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Adanya institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengawasan terhadap tindakan manajemen sangat tinggi.

Kaitan teori dengan penelitian ini adalah jika setiap tindakan manajemen dipantau dan diawasi secara efektif serta tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi maka potensi terjadinya praktik penghindaran pajak dapat ditekan, karena manajemen tidak dapat mengambil tindakan yang hanya akan menguntungkan pihaknya saja.

### **2.2.4 Komite Audit**

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pemantauan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dari pihak manajemen (Putu, 2016). Komite audit dapat memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal

perusahaan. selain itu, komite audit juga mempunyai fungsi untuk membantu dewan komisaris melaksanakan pengawasan atau monitoring secara menyeluruh.

Kaitan teori dengan penelitian ini adalah komite audit dikatakan dapat memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan, jika komite audit dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kegiatan manajemen dan memantau laporan keuangan karena pemahamannya terkait kebijakan keuangan dan akuntansi maka adanya tindakan penghindaran pajak perusahaan dapat dihindari.

#### **2.2.5 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan pada umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm, medium firm and small firm*. Besar kecilnya ditentukan berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar total aset maka hal itu berarti perusahaan memiliki prospek yang bagus dalam jangka waktu yang panjang (Gusti, 2014). Perusahaan yang dikatakan besar pada umumnya memiliki sumber daya yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk maksud dan kondisi tertentu. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan maka itu berarti perusahaan lebih stabil dan lebih optimal dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil.

Kaitan teori dengan penelitian ini adalah jika perusahaan besar mempunyai sumber daya manusia yang berlimpah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian sumber daya manusia tersebut mempunyai keahlian khusus. Sebagian sumber daya manusia tersebut mungkin mempunyai

kemampuan dalam meminimalisir biaya dalam hal ini termasuk pajak yang itu berarti perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

### **2.2.6 Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate social responsibility* (CSR) pada umumnya dilihat sebagai suatu komitmen perusahaan dalam bisnisnya untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencegah dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan dapat merugikan atau membahayakan masyarakat sekitar serta lingkungan yang menjadi *stakeholder* perusahaan (Dyah, 2015). Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan reputasi serta citra perusahaan, mendapatkan izin untuk beroperasi secara sosial, mengurangi risiko bisnis perusahaan, memperluas akses sumber daya bagi operasional perusahaan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan memungkinkan untuk mendapatkan penghargaan.

Kaitan teori dengan penelitian ini adalah jika perusahaan melakukan kegiatan CSR maka perusahaan akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan ekologi. Selain itu perusahaan yang menerapkan CSR akan fokus pada reputasi perusahaan dan tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan sekitar yang dapat mencemari reputasi perusahaannya. Sehingga, kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

### **2.2.7 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran

pajak adalah tindakan yang legal karena lebih banyak menggunakan kekurangan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Dyah, 2015). Apabila tindakan penghindaran pajak sudah terlalu melanggar aturan yang ada dalam perpajakan, maka hal tersebut dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan. tindakan tersebut tidak dapat lagi disebut penghindaran pajak namun sudah termasuk penggelapan pajak, risiko yang dapat dialami oleh perusahaan tersebut yaitu denda atau turunnya reputasi perusahaan.

Kaitan teori dengan penelitian ini adalah karena dalam penelitian ini penghindaran pajak menjadi variabel dependen, sehingga teori ini dibutuhkan untuk menjelaskan dan menjabarkan pemahaman terkait dengan tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, dan CSR merupakan variabel independen yang akan di uji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

### **2.3 Argumentasi Ilmiah Hipotesis Penelitian**

#### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu pemegang saham perorangan atau pemegang saham institusi, dan kepemilikan saham manajerial. Eksekutif atau direktur yang mempunyai saham termasuk dalam kategori pemegang saham perorangan atau pemegang saham institusi (pohan, 2009). Keberadaan kepemilikan institusional akan meminimalisir konflik kepentingan manajemen yang mungkin berupaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Semakin tinggi kepemilikan institusi maka akan mengurangi tindakan penghindaran pajak, dikarenakan pemilik institusi memiliki fungsi untuk memantau dan mengendalikan manajemen untuk taat terhadap aturan perpajakan (pohan,2009). Ketika melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak, persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau yang dimiliki oleh para pihak institusi akan menyebabkan timbulnya dividen, beban dividen tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian Deddy, Rita, Kharis (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran pajak**

Komite audit termasuk komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Komite audit dapat mengawasi proses pembuatan laporan keuangan dan pengendalian internal, karena BEI telah mewajibkan semua perusahaan untuk membentuk dan memiliki komite audit yang minimal terdiri dari tiga orang yaitu ketua komite audit, anggota komite audit yang berasal dari komisaris (maksimal hanya 1 orang), dan anggota komite audit lainnya yang berasal dari pihak eksternal yang independen (Ida, 2016). Segala keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit membuat komite audit lebih mengerti mengenai kelemahan dalam peraturan perpajakan dan

cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga komite audit dapat memberikan saran secara profesional untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Hal ini konsisten dengan penelitian Putu dan IGK Agung (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (GCG) didalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Hasibuan (2009) dalam Teguh (2015), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat dikelompokkan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Apabila perusahaan dikatakan besar maka besar pula aset yang dimilikinya. Dalam upaya mengurangi beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan cara menggunakan beban penyusutan dan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut karena beban penyusutan dan semua biaya-biaya dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Hal ini konsisten dengan penelitian Teguh, Yessi, Rusli (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka diindikasikan

perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Dengan besarnya aset perusahaan dan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dapat dilakukan manajemen pajak yang maksimal juga.

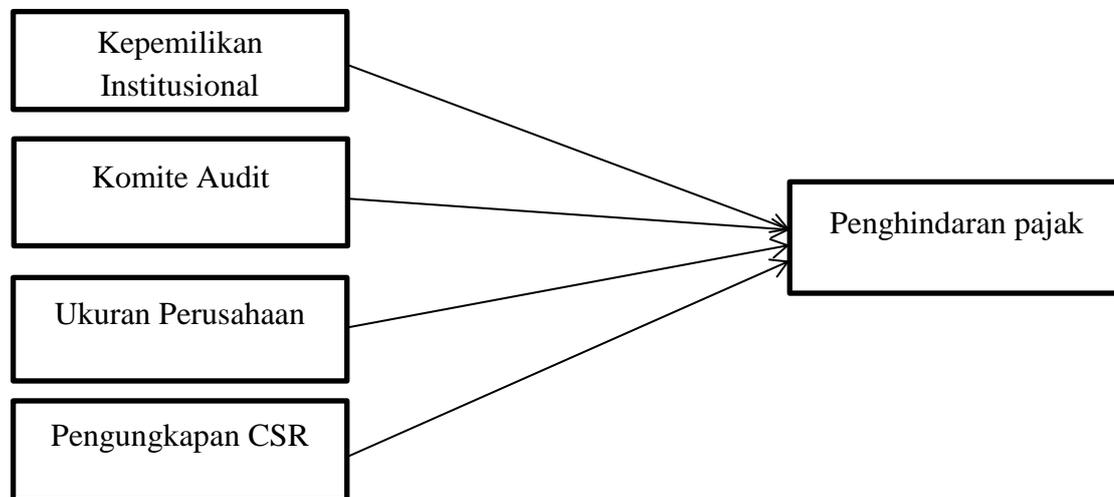
### **Pengaruh CSR Terhadap Penghindaran Pajak**

Secara umum perusahaan dalam berbisnis pasti mempunyai keinginan untuk menghasilkan laba yang besar, tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Beban pajak menyebabkan berkurangnya laba perusahaan. Supaya laba perusahaan tetap optimal maka perusahaan akan mengurangi beban pajak melalui praktik penghindaran pajak.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk dapat menyeimbangkan kinerja ekonomi dengan cara mengoptimalkan laba, kinerja lingkungan dengan cara peduli terhadap lingkungan alam sekitar, dan kinerja sosial dengan cara peduli terhadap masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka akan semakin baik pula pandangan masyarakat terhadap reputasi perusahaan (Rina, 2014). Dalam hal perpajakan, reputasi baik juga dapat diperoleh dari kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak kepada negara.

Hal ini konsisten dengan penelitian Dyah & Supriyadi (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan tindakan penghindaran pajak dilihat oleh beberapa orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial.

## 2.4 Kerangka Pemikiran



**GAMBAR 2.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

Penghindaran pajak sudah dianggap sebagai suatu hal yang lazim dilakukan, bahkan dianggap legal karena tindakan tersebut tidak melanggar peraturan yang ada hanya saja memanfaatkan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Banyak faktor-faktor atau hal-hal yang mendukung perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional adalah pihak luar yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi saham yang dilakukan. Kepemilikan saham menunjukkan suatu kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung atau tidak terhadap keputusan manajemen. Semakin banyak proporsi kepemilikan institusional maka semakin kecil peluang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, karena institusi akan mengawasi secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian manajemen sangat tinggi dan potensi penghindaran pajak dapat ditekan.

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengawasan, karena dengan segala wewenang dan pengetahuan yang mereka punya. Komite audit dapat memantau setiap gerak-gerik mencurigakan dari pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, peran komite audit sangat berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, karena mereka juga dapat memahami celah-celah peraturan perpajakan yang biasanya dimanfaatkan.

Perusahaan-perusahaan yang termasuk perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan, berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan secara optimal. Dalam hal ini berarti ukuran perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bentuk dari komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, memberikan dukungan pada pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat. Perusahaan yang CSR-nya rendah maka dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial sehingga kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa CSR dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

## 2.5 **Hipotesis Penelitian**

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H2 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindran pajak

H4 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindran pajak